

Judul : APBN 2017 Tetap Didesain Ekspansif
Tanggal : Jumat, 30 September 2016
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 17

APBN 2017 Tetap Didesain Ekspansif

JAKARTA – Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk sementara sepakat membuat desain Rancangan APBN 2017 tetap ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5,1% atau tumbuh menjadi Rp13.717 triliun.

Selain pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), asumsi makro lain yang disepakati antara lain inflasi 4,0%, suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan 5,3%, nilai tukar rupiah Rp13.300 per dolar Amerika Serikat (AS), dan harga minyak USD45 per barel.

Di dalam pembahasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta izin kepada legislator untuk memanfaatkan cadangan belanja negara sebesar Rp40,2 triliun. Munculnya cadangan tersebut salah satunya akibat kenaikan penerimaan karena perubahan target *lifting* minyak dan pengembalian biaya produksi minyak dan gas kepada kontraktor (*cost recovery*).

"Kami mengusulkan pemanfaatannya karena kita mengharapkan APBN tetap menjadi sumber pendorong pertumbuhan ekonomi dan terutama juga semakin memperbaiki tingkat kesenjangan dan

mengurangi kemiskinan," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut, cadangan belanja negara muncul karena ada dua asumsi makro yang berubah dari nota keuangan yakni kenaikan *lifting* minyak dari 780.000 barel per hari (bph) menjadi 815.000 bph dan *cost recovery* yang ditetapkan turun dari USD11 miliar menjadi USD10,4 miliar. Sri Mulyani mengatakan, perubahan kedua asumsi makro tersebut membuat target penerimaan dari sektor migas naik Rp9,7 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, cadangan belanja negara tersebut akan disalurkan untuk tiga pos belanja. *Pertama*, belanja pemerintahan pusat sebesar Rp36,7 triliun, termasuk belanja kementerian/lembaga Rp21 triliun. *Kedua*, adalah cadangan risiko energi Rp4,3 triliun untuk mencili tagihan subsidi kepada PT Perusa-



Menteri Keuangan Sri Mulyani (dua kanan) bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan), Menkumham Yasonna Laoly (dua kiri) dan Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Badan Anggaran di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Dalam rapat tersebut pemerintah dan DPR menyepakati postur sementara RUU APBN Tahun Anggaran 2017.

haan Listrik Negara (Persero) yang totalnya mencapai Rp11,4 triliun. Adapun, sisanya akan digunakan untuk membiayai dana alokasi umum (DAU) kepada 169 daerah yang ditunda tahun ini.

Dengan pemanfaatan cadangan tersebut, beberapa postur anggaran pun ikut berubah.

Dari sisi pendapatan, pendapatan negara ditetapkan Rp1.750 triliun dengan penerimaan perpajakan menjadi Rp1.498,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi Rp250 triliun. Sedangkan penerimaan hibah akan tetap sama dengan nota keuangan," sambungnya.

Dari sisi belanja, ujar Sri Mulyani, total belanja pemerintahan pusat mencapai Rp1.314 triliun dengan belanja K/L menjadi Rp758,4 triliun dan transfer ke daerah menjadi Rp766,4 triliun. Dia juga menaikkan belanja non-K/L sebesar Rp4,3 triliun untuk menjaga amanat ter-

kait porsi anggaran pendidikan dan kesehatan.

"Jadi anggaran pendidikan tetap akan kita jaga 20% dan anggaran kesehatan tetap kita jaga 5%. Dengan demikian, pengeluaran atau belanja pendidikan menjadi Rp416,1 triliun dan kesehatan Rp104 triliun," katanya.

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja, Sri Mulyani mengatakan, neraca keseimbangan primer membaik dari Rp111,4 triliun pada tahun ini menjadi Rp109 triliun untuk 2017. Sementara, defisit anggaran juga membaik dari sisi nominal dari Rp332,8 triliun menjadi Rp330,2 triliun. "Tapi secara persentase terhadap PDI karena nominal PDB-nya berubah, tetap 2,41%," imbuhnya.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DWMartowidjone yakin, R-APBN 2017 lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Dia juga menyebut, laju pertumbuhan PDB tahun depan yang ditetapkan 5,1% juga mencerminkan skenario yang konservatif.

"Jadi, ini menunjukkan fiskal yang disetujui akan lebih sehat dan akan lebih kredibel sehingga indikator-indikator ekonomi Indonesia menjadi lebih baik," ucapnya.

Sementara terkait nilai tukar, Agus mengatakan bahwa pihaknya menyampaikan usulan terbarunya sebesar Rp13.200-13.500 per dolar AS untuk rata-rata setahun. Dia mengatakan, angka Rp13.30 per dolar AS yang ditetapkan cukup tepat. "Kalaupun tadi ditetapkan Rp13.200, kita akan nyaman," ujarnya.

@rahmatfiansya